DAFTAR PUSTAKA

Amiri, Kartika. 2014. “Secara Akuntable Menuju Good Governance Pengelolaan BMN.” *Potret Pemikiran* Vol.20(No. 2): 31–44.

Aufa Moerrin, Dimas, dan Hero Priono. 2022. “Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(11): 4857–68.Azizah, Y. N. (2024). Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. 2018. “Laporan Akuntabilitas.” : 322.

DJKN. Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasar-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html). Di Akses Pada 22-06-2025.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *Humanika* 21(1): 33–54.

Handayani, Fitria Andalus, dan Mohamad Ichsana Nur. 2019. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11(1): 1–11.

Hidayah, A.L. (2023:12). 5 (Lima) prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara. Djkn.kemenkeu. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/. (Di akses pada 26 januari 2025).

Indonesia, Republik. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Online), (https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016).

Keban, Y. T. (2008). Enam dimensi strategis administrasi publik. *Yogyakarta: Gava Media*. (Di akses pada 24 januari 2025).

Labasido, Esduo Ramadhano, dan Darwanis Darwanis. 2019. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(2): 215–36.

Lestari, I. P. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap* Akuntabilitas Kinerja (Studi Survei pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung*)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

LPPSDM 2021. Bimtek Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah. (www.bimteknas.com/bimtek-aset-daerah-dan-barang-milik-daerah) Di akses pada 12 maret 2025.

Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III. (2015). "Akuntabilitas" Lembagga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No 10 jakarta 10110. Di akses pada 08 maret 2025.

Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *6*(1), 63–82.

Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. 2009. "Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah." *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM* (September): 1–2.

Paranga. J. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 1, April 2020 : 54-79

PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Online), (https://peraturan.bpk.go.id/Details/5464/pp-no-27-tahun-2014).

Pasolong, H. (2011). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Memasuki Reformasi Birokrasi (Pilihan atau Keharusan). Jurnal Administrasi Negara, 297-305.

Raharja, Mega, Ratih Nur Pratiwi, dan Abdul Wachid. 2015. "Pengelolaan keuangan dan aset daerah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(1): 111–17.

Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1." *Jurnal Media Hukum* 1964(1): 1–122.

Soemarsono, (2018). Tentang SDM (Sumber Daya Manusia). Pilar Penting Atas Keberhasilan dan Kegagalan Organisasi. (Online),(https://djpb.kemenkeu. go.id/kppn/palangkaraya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2825-sdm-sumbe r-daya-manusia-pilar-penting-atas-keberhasilan-dan-kegagalan organisasi)

Winaya, at.al 2015 Evaluasi Transparansi Dan Akuntabilitas Inventarisasi Bmd Pada Badan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangli."media.neliti.com

Wulandari, F. 2019. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.

Yusuf, M. (8). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. *Jakarta: Salemba Empat*, *8*.